

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ashyadie, Zaeni, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 1997, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang, Joni, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Direktorat PWNI & BHI Kemlu RI, 2016, *Tahun Kedua Kabinet Kerja: Kaleiodoskop Perlindungan WNI '16*, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.
- _____, 2017, *Tahun Ketiga Kabinet Kerja: Kaleiodoskop Perlindungan WNI '17*, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.
- Human Rights Watch*, 2008, *As If I am Not a Human: Abuses against Asian Domestic Workers in Saudi Arabia*, Human Rights Watch, New York.
- Husni, Lalu, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2004, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Mundar Maju, Bandung.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2012, *Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan: Pemerataan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008, *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam 10 Tahun Reformasi*, Penerbit Komnas HAM, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Teori Hukum*, Penerbit: Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philips, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Migrant Care*, 2015, *Catatan Akhir Migrant Care: Negara Belum Hadir dan Perlindungan masih Semu untuk Buruh Migran Indonesia*, *Migrant Care*, Jakarta..
- N., Fernandez, 2014, *Essential yet Invisible: Migrarnt Domestic Workers in the GCC. Gulf Labour Market and Migration*, *European University Institute, Italia*.
- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remadja Rosdakarya, Bandung..
- Sumitro, Ronny Hanityo, 1985, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,
- _____, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Susilo, Wahyu, Hidayah, Anis, dan Mulyadi, 2015, *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*, *Migrant Care*, Jakarta.
- T. Malit, Froilan, and Naufal, George, 2014, *Asymmetric Information under the Kafala*, *Cornell University ILR School, Uni Emirates Arab*.
- T. Raharjo, Santoso, 2015, *Edisi Revisi Buku: Assessment dan Wawancara dalam Praktik Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Unpad Press, Bandung.
- Wijayanti, Asri, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zuhur, Sherifa, 2011, *Saudi Arabia*, ABC-CLIO, California.

B. Jurnal dan Publikasi:

Blackett, Adelle. 2011. *The Decent Work for Domestic Workers Convention and Recommendation No. 106. American Journal of International Law.*

Diana Fatmawati, 2016. *Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014*. Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

Eka Ernawati, 2015. *Penghentian & Pelarangan PRT Migran ke Negara di Timur Tengah*. Newsletter: *Migrant Care*. Jakarta.

Hilmy, Umu, 2010. *Urgensi Perubahan UU Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri*. RDP antara Pakar dengan Panja Pekerja Indonesia Komisi IX tanggal 16 Desember 2010. Jakarta.

Judge, Zulfikar. 2012. *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Universitas Esa Unggul. *Lex Jurnalica Vol. 9 No. 3*. Jakarta.

Cholil, Nafis, Juli 2012, *Moratorium Pengiriman TKI Ke Arab Saudi*. *Majalah KJRI Jeddah Suara Indonesia*. Jeddah.

Nola, Luthvi Febryka, Vol. IX, No. 08/II/Puslit/April/2017, *Upaya Penguatan Pengaturan Pengiriman TKI*. *Majalah Info Singkat Hukum: Badan Keahlian DPR RI*. Jakarta.

C. Laporan:

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran Tahun 2016*, Jakarta.

Diskusi Publik Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest) di Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Tifa dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

*terhadap Hasil Kajian Pemantauan PPTKIS oleh Pekerja Migran,
pada 11 Desember 2018 di Cikini, Jakarta Pusat.*

*Laporan Penelitian dan Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2015,
Sekretariat Migrant Care, Jakarta.*

*Rapat Kordinasi Perlindungan WNI yang diselenggarakan oleh
Kementerian Luar Negeri RI, 20 Oktober 2015, disampaikan
melalui presentasi oleh Hariyanto, Ketua Umum Serikat Buruh
Migran Indonesia (SBMI), Balai Kartini, Jakarta.*

D. Situs/Laman Web:

BNP2TKI, PPID. “Pengaduan TKI Tertinggi dari Saudi Arabia”,
<http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/component/content/article/74-berita-terkini/343-pengaduan-tkitertinggi-dari-saudi-arabia>

Databoks. “Hampir 40% Remitansi TKI Berasal Dari Timur Tengah”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/25/hampir-40-remitansi-tki-berasal-dari-timur-tengah>

Migrant Care, Sekretariat. “Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”,
<http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/>

Stefanie, Christie, “Jokowi Minta Raja Salman Lindungi TKI di Arab
Saudi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170301191615-20-197132/jokowi-minta-raja-salman-lindungi-tki-di-arab-saudi>

Wijaya, Sastra. “Wahyu Susilo: Pembela Migran Indonesia Yang
Bermasalah Dimanapun Juga”,
<https://www.abc.net.au/indonesian/2018-11-09/wahyu-susilo-pembela-migran-indonesia-di-luar-negeri-/10477066>

Fuadillah Habib, Muhammad Alhada. “Warga Negara dan
Kewarganegaraan”, https://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-63562-Makalah-Warga%20Negara%20dan%20Kewarganegaraan.html

Ratnaningsih, Erna. "*Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*", <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>

E. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) (Lembaran Negara Republik Indonesia, 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2004 Nomor 95).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia, 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3572).

Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5338).

Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5390).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660).

Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia, 2006).

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, 2015).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia, 2018).

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (Berita Negara Republik Indonesia, 2018).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Berita Negara Republik Indonesia, 2019).

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bursa Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia, 2010).

F. Kamus:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud. 2016.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

G. Wawancara:

Hasil wawancara dengan Ketua Pusat Studi Kajian dan Migrasi *Migrant Care* yang bernama Anis Hidayah pada 25 Januari 2019 di Kantor Sekretariat *Migrant Care*, Jakarta.

Hasil wawancara dengan Kasubbag. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum BNP2TKI yang bernama Dewi Hariani pada 7 Desember 2018 di Kantor BNP2TKI, Jakarta.

Hasil wawancara dengan Kasubdit II Arab Saudi Direktorat PWNI dan BHI Kemlu RI yang bernama Ilham Effendi pada 20 Desember 2018 di Kantor Kemlu RI, Jakarta.

Hasil wawancara dengan Plt. Kasubdit I Arab Saudi Direktorat PWNI dan BHI Kemlu RI yang bernama Jean Anes pada 20 Desember 2018 di Kantor Kemlu RI, Jakarta.

Hasil wawancara dengan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia yang bernama Lalu Muhamad Iqbal pada 20 Desember 2018 di Kantor Kemlu RI, Jakarta.

Hasil wawancara dengan Kepala Biro Humas Kemnaker RI yang bernama Soes Hindharno pada 21 Februari 2019 di Kantor Kemnaker RI, Jakarta.